

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, F. D. dan Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(3): 479.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Fajri, R., Setyowati, E., dan Siswidiyanto. 2014. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *JAP* 3(7): 1101.
- Hannifah, S. I. dan Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(8): 2
- Juliana, P. dan Widhianningrum, P.2017. Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 6(2): 170.
- Khilmiyah, I. 2016. Penyajian laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Skripsi. Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi Dana Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marvanti, I. V. dan Praptoyo, S. 2017. Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (2): 549.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J., dan Gerungai, N. 2017. Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 53
- Orangbio, V. V., Tinangon, J., dan Gerungai, N. 2017. Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 56.

- Rahayu, D. 2017. Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *EDAJ* 6(2): 109.
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2015 *Pengelolaan Keuangan Desa*. Nomor 4. Berita Manggarai Nomor 4. Manggarai.
- \_\_\_\_\_. Nomor 44 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai*. Lembaga Peraturan Bupati. Manggarai.
- \_\_\_\_\_. Nomor 45 Tahun 2015 *Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016*. Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 45. Manggarai.
- Peraturan Desa Bere Nomor 1 Tahun 2015 *RPJM Desa Bere*. Bere.
- \_\_\_\_\_. Nomor 2 tahun 2016 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*. Bere.
- Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2016 *RKPDesa Tahun Anggaran 2016*. Bere
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 *Perubahan Kedua Aatas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah 23 Mei 2011*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 37 Tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri*. 24 Juli 2007. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 111 Tahun 2014 *Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 114 Tahun 2014 *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Jakarta.

\_\_\_\_\_. nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Sari, R.M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek* 7(2): 142

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Supheni, I. 2016. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). *EKSIS XI* (2): 195.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta

\_\_\_\_\_. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Desa*. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 4862. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Nomor 32 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta

[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

[www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

[www.keuandangesa.com](http://www.keuandangesa.com)

Yatminiwati, M. 2018. Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang). *Jurnah ilmiah ilmu akuntansi, keuangan dan pajak*. 2(1): 49.